

BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Edisi 17, Vol. I. September 2016

7-Day Reserve Repo Rate, Acuan Suku Bunga Baru Bank Indonesia

p. 06

Mengentaskan Kemiskinan dengan Meningkatkan Ekonomi Desa

p. 02

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajiananggaran.dpr.go.id
ISSN 2502-8685



9 772502 868006

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc

Adhi Prasetyo S. W., S.M.

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Editor

Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Ade Nurul Aida, S.E.

DAFTAR ISI

Update APBN.....	p.01
Mengentaskan Kemiskinan dengan Meningkatkan Ekonomi Desa.....	p.02
7-Day Reserve Repo Rate, Acuan Suku Bunga Baru Bank Indonesia.....	p.06

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

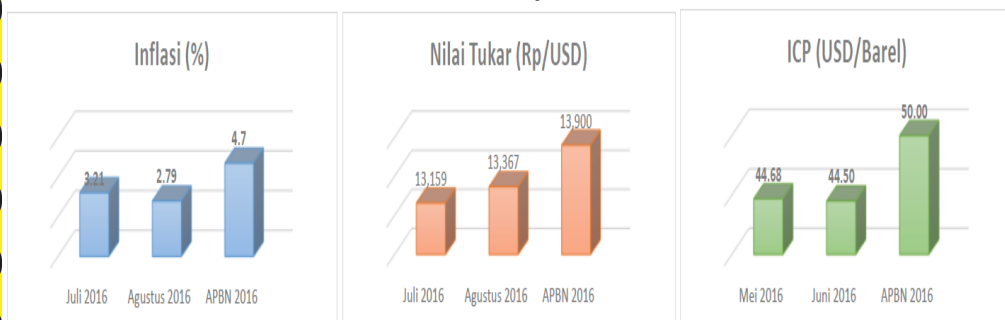
UPDATE APBN

Pada bulan Agustus 2016 terjadi inflasi sebesar 2,79 persen menurun dibanding Juli lalu yang inflasinya sebesar 3,21 persen.

Untuk nilai tukar rupiah, terhadap Dollar AS, nilai rata-rata kurs tengah selama bulan Agustus 2016 sebesar Rp13.367/USD mengalami pelemahan dibanding bulan sebelumnya sebesar Rp13.159/USD

Sementara untuk harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) pada bulan Juni 2016 turun sebesar US\$0,18 per barel menjadi US\$44,50 per barel dari US\$44,68 per barel pada bulan Mei 2016.

Asumsi Makro Ekonomi 2016 dan Target APBN 2016



Sumber: BPS, 2016

Sumber: BI, 2016

Sumber: ESDM, 2016

Mengentaskan Kemiskinan dengan Meningkatkan Ekonomi Desa

Dahiri¹⁾

Pada dasarnya manusia ingin hidup berkecukupan, begitu juga dengan negara Indonesia menginginkan rakyatnya bisa berkecukupan dan sejahtera, karena hal tersebut merupakan cita-cita negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yakni memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum yang dimaksud yaitu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan tantangan bagi setiap Presiden terpilih untuk bisa mengurangi angka kemiskinan. Namun, dari masa Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo angka kemiskinan tahun 2015 sebesar 11,13 persen mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 10,92 persen. Padahal banyak program-program yang telah dilakukan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan, namun sebaliknya angka kemiskinan justru semakin meningkat. Bertambahnya angka kemiskinan ini disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah meningkatnya angka pengangguran. Angka pengangguran tahun 2015 sebesar 6,18 persen lebih tinggi dari tahun 2014 sebesar 5,94 persen. Peningkatan angka pengangguran tidak lepas dari lapangan kerja yang belum mampu menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah

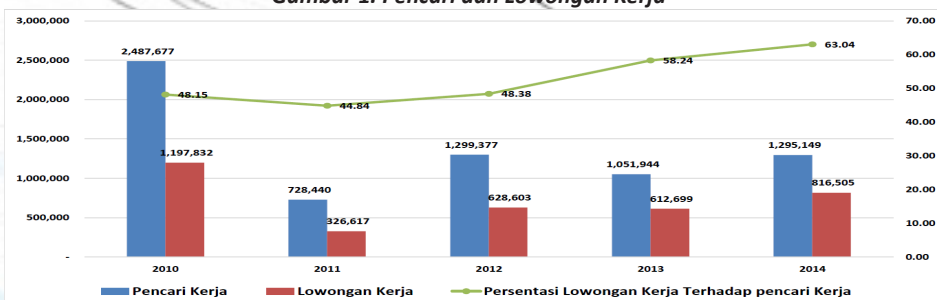
demi mewujudkan cita-cita bangsa.

Pengangguran Salah Satu Faktor Kemiskinan

Pertumbuhan penduduk setiap tahun cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan ini belum tentu diimbangi dengan jumlah lapangan kerja. Penurunan lapangan kerja bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor berkurangnya permintaan suatu produk dan transformasi tenaga manusia dengan tenaga mesin sering kali memberikan dampak negatif terhadap lapangan kerja. Selain itu, jumlah pencari kerja dan lapangan kerja belum bisa seimbang. Dari grafik 1, jumlah pencari kerja setiap tahunnya melebihi jumlah lowongan kerja yang ada. Sisa pencari kerja yang belum mendapatkan kerja akan berpotensi menjadi pengangguran.

Berdasarkan hasil analisa menjelaskan bahwa pengangguran mempengaruhi kemiskinan, jika pengangguran semakin meningkat, maka kemiskinan juga akan meningkat dan sebaliknya²⁾. Hal ini jelas menunjukkan bahwa upaya Pemerintah untuk bisa mengentaskan kemiskinan adalah dengan tetap berupaya menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja yang dimaksud bukan hanya fokus pada industri di kota, namun Pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja di pedesaan.

Gambar 1. Pencari dan Lowongan Kerja

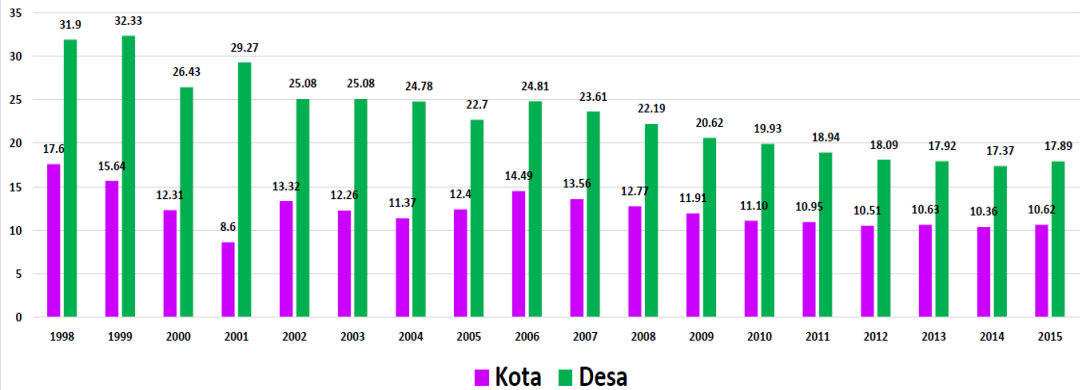


Sumber: BPS, diolah

1) Dewan Redaksi Buletin APBN

2) Hasil analisis data yang telah dilakukan penulis tahun (judul)

Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)



Sumber: BPS, diolah

Kemiskinan Cenderung Lebih Besar di Desa

Salah satu agenda pembangunan Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo yang telah dirumuskan dalam Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Jika program ini diimplementasikan dengan optimal, maka kemiskinan yang melanda Indonesia bisa diminimalisir dengan baik. Desa merupakan lokomotif pembangunan nasional, karena adanya suatu negara tidak lepas dari adanya desa. Pemerintah melakukan pembangunan-pembangunan ekonomi cenderung berada di kota. Sedangkan pembangunan ekonomi di perdesaan masih minim. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung untuk urbanisasi ke kota sebagai upaya mencari kerja. Padahal masyarakat yang ke kota dengan tidak dibekali pendidikan

cenderung mengalami kesulitan mencari kerja yang menimbulkan potensi pengangguran di kota dan menimbulkan potensi kemiskinan.

Namun, walaupun banyak masyarakat yang urbanisasi ke kota, jumlah kemiskinan masih lebih besar di desa. Artinya perekonomian di desa masih rendah. Sehingga hal ini dapat menjadi fokus bagi Pemerintah untuk melakukan pembangunan berawal dari desa.

Mengentaskan Kemiskinan dengan Meningkatkan Ekonomi Desa

Jumlah penduduk kota setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan ini dipengaruhi oleh angka kelahiran dan urbanisasi, sedangkan jumlah penduduk desa cenderung hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran. Mulai tahun 2005 jumlah penduduk kota cenderung mengimbangi jumlah penduduk desa, bahkan jumlah penduduk kota dari tahun 2013 sampai 2015 lebih besar dari jumlah penduduk di

Gambar 3. Jumlah Penduduk Kota Dan Desa



Sumber: BPS, diolah

Tabel 1. Persentase Tenaga Kerja Menurut Pekerjaan Utama

Lapangan Pekerjaan Utama	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan	38.35	36.39	35.19	34.78	34.00	32.88	35.26
Pertambangan dan Penggalian	1.16	1.34	1.42	1.27	1.25	1.15	1.26
Industri	12.78	13.54	13.88	13.27	13.31	13.29	13.34
Listrik, Gas, dan Air Minum	0.22	0.22	0.22	0.22	0.25	0.25	0.23
Konstruksi	5.17	5.83	6.09	5.63	6.35	7.15	6.04
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	20.79	20.76	20.90	21.38	21.66	22.37	21.31
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5.19	4.66	4.49	4.52	4.46	4.45	4.63
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.61	2.40	2.40	2.57	2.64	2.84	2.41
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	14.75	14.87	15.40	16.36	16.07	15.62	15.51

Sumber: BPS, diolah desa.

Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah untuk bisa meningkatkan daya tarik hidup di desa, karena salah satu program unggulan pembangunan nasional yaitu membangun dari desa. Walaupun dari tahun 2013 jumlah penduduk lebih besar di kota, tapi jumlah penduduk miskin masih didominasi oleh masyarakat desa. Program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sudah banyak dilakukan. Program tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Program Beasiswa untuk Keluarga Miskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan subsidi pupuk. Semua program tersebut masih belum optimal menurunkan angka kemiskinan, karena program tersebut belum tepat untuk bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dari sisi lapangan kerja, sektor yang mendominasi serapan tenaga kerja yang cukup besar yaitu sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan (P3K) dengan menyerap tenaga kerja rata-rata dari 2010-2015 sebesar 35,26 persen.

Sektor P3K merupakan sektor yang lebih didominasi oleh masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu, peningkatan sektor P3K merupakan langkah yang tepat untuk bisa mengentaskan kemiskinan khususnya di desa. Berdasarkan beberapa penelitian juga menyimpulkan bahwa sektor pertanian sangat efektif untuk mengurangi kemiskinan³. Seharusnya percepatan perekonomian perdesaan bisa

berjalan dengan baik, karena mulai tahun 2015 Pemerintah telah merealisasikan penyaluran dana desa. Jika dana desa tersebut digunakan fokus untuk kegiatan perekonomian, maka potensi ekonomi desa bisa meningkat.

Menurut hemat penulis, program yang sudah ada perlu perbaikan. Perbaikan yang dimaksud adalah menambahkan program yang dapat fokus meningkatkan perekonomian desa. Dengan adanya dana desa seharusnya pemerintah pusat dan daerah serta perangkat desa bisa meningkatkan ekonomi desa. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ekonomi desa sesuai sektornya adalah sebagai berikut: **di sektor pertanian dan perkebunan**, Pemerintah harusnya dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penggilingan padi, penggilingan kopi, traktor untuk bajak sawah dan kebun, dan pengolahan karet dan sawit. BUMDes penggilingan padi merupakan solusi untuk bisa mengurangi biaya penggilingan yang berdampak pada beras yang bisa murah dengan catatan biaya penggilingan di BUMDes bisa lebih murah. Mahalnya beras yang ada di pasaran tidak lepas dari mahalnya biaya produksi beras tersebut. Selain itu, petani bisa mendapat nilai tambah terhadap penjualan beras dibandingkan dengan menjual gabah langsung. BUMDes penggilingan kopi merupakan solusi agar petani kopi bisa mendapatkan hasil dari kopi lebih maksimal. Petani kopi untuk bisa menjual beras kopinya memakan biaya yang tidak sedikit, dari upah petik dan waktu menjemur kopi sampai kering

3) Tambunan, Pembangunan.2016. Ekonomi Inklusif

memakan waktu yang lama, belum lagi kopi merupakan hasil tahunan. Dengan adanya BUMDes ini, biaya penggilingan kopi diharapkan bisa lebih murah sehingga margin yang diperoleh petani kopi bisa lebih besar dari sebelumnya. BUMDes traktor merupakan solusi untuk mendapatkan biaya bajak sawah atau kebun yang lebih murah. Dengan begitu, margin yang diperoleh petani bisa lebih besar. BUMDes pengolahan karet dan sawit merupakan solusi agar harga jual petani bisa lebih stabil, serta lebih tinggi. Karena saat ini cenderung petani menjual tidak langsung ke industri pengolahan. Akibatnya harga lebih bergejolak dan lebih murah, karena pembeli juga mengambil margin atas pembeliannya.

Sektor peternakan, BUMDes pembibitan hewan merupakan solusi bagi peternak agar mendapatkan bibit yang lebih baik dan relatif ekonomis. Para peternak rakyat cenderung mengalami kesulitan dalam mendapatkan bibit. Akibat sulitnya mendapatkan bibit, harga bibit menjadi mahal. BUMDes ini diharapkan bisa memberikan solusi untuk bisa mendapatkan bibit ternak dengan harga lebih ekonomis sehingga peternak bisa memperoleh margin optimal. Dengan begitu kegiatan ekonomi bisa berjalan berkelanjutan.

Dalam **sektor perikanan**, BUMDes pembenihan ikan dan pengolahan ikan merupakan solusi bagi budidaya ikan dan hasil penangkapan ikan. BUMDes bisa menyuplai benih kepada budidaya dengan harga yang ekonomis dengan catatan BUMDes melakukan budidaya pembenihan, bukan benih hasil pembelian terus dijual ke masyarakat atau budidaya. Kemudian adanya BUMDes pengolahan ikan merupakan solusi agar harga jual ikan dapat lebih ekonomis dan terjangkau masyarakat, serta masyarakat memiliki nilai jual yang lebih.

Selain P3K, **infrastruktur desa juga menjadi penting**. Pada hakekatnya dana desa dapat membantu negara dalam membangun infrastruktur di desa. Sebagai contoh pembangunan

jalan. Pembangunan jalan yang layak dilalui menjadi hal yang sangat penting, karena produk yang dihasilkan dari desa perlu dipasarkan dan membutuhkan infrastruktur jalan yang layak. Jika jalan tidak layak, maka distribusi pemasaran produk desa akan memakan waktu yang lama. Sehingga akan berdampak pada kenaikan harga pada produk tersebut.

Catatan Redaksi

Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan ekonomi. Naik turunnya angka kemiskinan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah baik regulasi maupun anggaran. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun, pada tahun 2015 angka kemiskinan mengalami kenaikan dari tahun 2014. Angka kemiskinan lebih besar di desa dibandingkan di kota. Salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan adalah peningkatan ekonomi desa dengan membentuk badan usaha milik desa (BUMDes). Pembentukan ini masih realistis untuk dilakukan, karena mulai tahun 2015 pemerintah telah melaksanakan dana desa. Dana desa tersebut tidak lain untuk menggerakkan perekonomian desa. BUMDes yang dimaksud yaitu BUMDes penggilingan padi, penggilingan kopi, traktor untuk bajak sawah dan kebun, dan pengolahan karet dan sawit untuk sektor pertanian dan Perkebunan, BUMDes pembibitan hewan untuk sektor peternakan, dan BUMDes pembenihan ikan dan pengolahan ikan untuk sektor perikanan. Kemudian perlu pemetaan untuk bisa memetakan pembentukan BUMDes sesuai dengan potensi desa sehingga setiap desa mempunyai produk unggulan. Demi peningkatan taraf ekonomi desa, pembentukan BUMDes adalah amanah UU Desa yang perlu diprioritaskan.

Daftar Pustaka

- Tambunan, Tulus. 2016. *Pembangunan Ekonomi Inklusif*. Jakarta: LP3ES
- Biro Analisa APBN. 2012. *Pro Poor Budget*. Jakarta: Setjen DPR RI

7-Day Reserve Repo Rate, Acuan Suku Bunga Baru Bank Indonesia

Rastri Paramita¹⁾

Abstrak

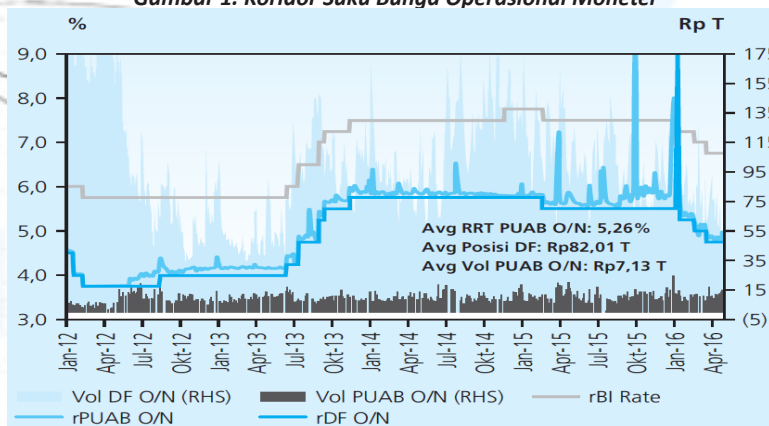
Pemberlakuan 7-day Reserve Repo Rate bertujuan agar transmisi kebijakan BI dapat terefleksikan di pasar dengan cepat. Selain itu, 7-day Reserve Repo Rate juga merupakan instrumen moneter yang dirasa mampu mendukung pendalaman pasar keuangan Indonesia. Jika pasar keuangan Indonesia dapat diperdalam maka akan memberikan dampak positif terhadap pemerintah karena akan menjadi alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBN. Dan hal ini diharapkan akan mendukung pertumbuhan sektor riil.

Sejak 19 Agustus 2016, Bank Indonesia (BI) menggunakan 7-day Reserve Repo Rate atau disebut BI 7-day Rate sebagai acuan suku bunga yang baru. Repo adalah aktivitas beli surat berharga dengan kesepakatan menjual lagi dan reserve Repo sebaliknya, jual surat berharga dengan kesepakatan membeli lagi. Dengan demikian, dalam struktur tenor operasi moneter, suku bunga kebijakan akan bergeser dari tenor 1 tahun (360 hari) menjadi tenor yang lebih pendek yaitu 7 hari. Tujuan perubahan ini adalah untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter, sehingga lebih responsif terhadap perubahan tingkat suku bunga kebijakan maupun dampaknya terhadap suku bunga pasar uang dan perbankan²⁾.

Perubahan kebijakan moneter ini

dilakukan sebagai respon BI terhadap kurang efektifnya pengaruh operasi moneter yang dilakukan BI terutama sejak derasnya aliran masuk modal asing sejak krisis global 2010-2012 sebagai dampak dari kebijakan *quantitative easing* yang dilakukan oleh beberapa negara yang terkena krisis keuangan tersebut. Kondisi perekonomian saat ini diperparah dengan melemahnya harga komoditas sehingga para investor berbondong-bondong menanamkan modalnya di pasar uang. Karena Indonesia termasuk *emerging country*, maka modal asing semakin deras masuk melalui pasar uang maupun pasar modal Indonesia sehingga menyebabkan perbedaan yang besar antara suku bunga BI-Rate dengan perkembangan suku bunga di Pasar Uang Antarbank (PUAB), terutama sejak pertengahan 2010. Besarnya ekspek likuiditas yang masuk ke PUAB dari

Gambar 1. Koridor Suku Bunga Operasional Moneter



Sumber: www.bi.go.id

1) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. e-mail: rastri.26@gmail.com

2) Bank Indonesia. www.bi.go.id

derasnya aliran masuk modal asing menyebabkan suku bunga PUAB tenor jangka pendek menjadi sangat rendah mendekati suku bunga *deposit facility* jauh di bawah suku bunga BI *rate*. Belum berkembangnya PUAB juga menyebabkan belum terbentuknya struktur suku bunga di PUAB, khususnya untuk tenor-tenor di atas 3 bulan hingga 12 bulan. Sehingga transmisi kebijakan moneter menjadi kurang efektif dalam mempengaruhi suku bunga di pasar uang. Harapannya BI mampu mendekati suku bunga kebijakan ke arah sektor yang diacu oleh pasar uang yaitu tenor yang lebih pendek³.

7-day Repo Rate mengacu pada instrumen operasi moneter yang aktif ditransaksikan antara BI dengan perbankan (transaksional) setiap hari. Penggunaan *7-day Repo Rate* digunakan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan khususnya instrumen repo. Perubahan suku bunga kebijakan baru dilakukan saat ini karena kondisi makro ekonomi yang mendukung, seperti inflasi yang rendah dan stabil, pertumbuhan ekonomi yang relatif baik serta indikator-indikator ekonomi yang kondusif. Dalam menentukan perubahan suku bunga kebijakan, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, yaitu bersifat transaksional (antara BI dengan perbankan), memiliki pasar yang relatif dalam, dan memiliki hubungan yang kuat dengan sasaran operasional kebijakan moneter.

Jadwal pengumuman *7-day Repo Rate* yaitu sebulan sekali sesudah Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan. Setelah pengumuman hasil RDG setiap bulannya *7-day Repo Rate* akan tetap sama selama sebulan sampai pengumuman RDG bulan berikutnya. Perubahan (naik/turun) BI *7-day Repo Rate* per 25bps sesuai *best practice* di bank sentral negara lain, studi komprehensif yang dilakukan BI, dan mempertimbangkan efektivitas di pasar uang rupiah, valas, dan lainnya.

Dari penguatan operasi moneter ini, terdapat tiga dampak utama yang

diharapkan, pertama menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (*Reserve*) *Repo Rate* 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Hal ini diharapkan akan menambah atraktif kondisi pasar keuangan Indonesia. Kedua, meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan struktur bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan. Penguatan operasi moneter akan disertai dengan langkah-langkah untuk percepatan pendalaman pasar uang.

Pendalaman Pasar Uang

Menurut Bank Indonesia, Instrumen BI *7-Day Reverse Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan. BI *7-Day Reverse Repo Rate* diterapkan agar transmisi kebijakan BI terefleksikan serta memastikan transaksi pasar uang bisa dieksekusi.

Selain mengganti suku bunga acuannya, BI juga akan menjaga batas bawah koridor suku bunga penyediaan dana rupiah kepada perbankan dari BI atau *lending facility 75 basis points* (bps) dari *7-Day Reverse Repo Rate*, dan batas atas suku bunga penempatan dana rupiah oleh perbankan di BI atau *deposit facility 75 bps* dari *7-Day Reverse Repo Rate*. Dengan penurunan tingkat suku bunga ini juga akan membuat penurunan suku bunga dalam fasilitas pembiayaan (kredit). Hal ini akan memberikan angin segar bagi sektor industri, dan juga sektor lain yang sensitif dengan suku bunga seperti halnya sektor properti dan otomotif⁴.

Saat ini BI sedang menggodok instrumen pasar uang baru yaitu sertifikat deposito atau *negotiable certificate of deposit* (NCD)⁵. Selain inovasi kebijakan BI dalam memperdalam pasar keuangan, seyogyanya pemerintah mendukung dari sisi fiskal seperti menerbitkan

3) Bank Indonesia. www.bi.go.id

4) Bank Indonesia. www.bi.go.id

5) Koran.bisnis.com, Kamis 2-6-2016

surat berharga jangka pendek. Jika instrumen bertenor pendek semakin banyak variannya, diharapkan transaksi di pasar keuangan dapat lebih aktif dan perputaran uang dapat lebih cepat sehingga berimplikasi pada likuiditas perbankan serta mampu lebih atraktif menjerang investor asing maupun dalam negeri.

Jika pasar uang mampu semakin dalam, maka akan menjadi keuntungan bagi pemerintah dalam mencari alternatif pembiayaan pembangunan melalui pasar keuangan selain dari APBN.

Pelonggaran Moneter dalam Mendukung Sektor Riil

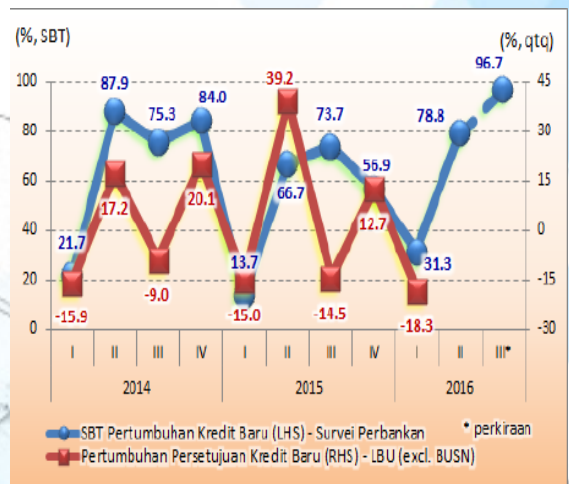
Bank Indonesia selama semester II 2015 telah mengeluarkan kebijakan makroprudensial berupa pelonggaran pemberian kredit properti dan uang muka kredit kendaraan bermotor (*Loan to Value Ratio/Financing to Value Ratio (LTV/FTV)*) dan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan kredit perbankan, serta kebijakan *countercyclical* guna menjaga stabilitas sistem keuangan⁶. Pelonggaran rasio LTV/FTV mulai berdampak pada peningkatan penyaluran kredit properti. Sementara upaya mendorong intermediasi perbankan melalui kebijakan pendalaman pasar keuangan dan penyaluran kredit ke sektor produktif (*Loan to Funding Ratio/LFR* yang dikaitkan dengan GWM) telah memperlonggar ruang penyaluran kredit dan mulai mendorong bank untuk meningkatkan penerbitan Surat-Surat Berharga (SSB). Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan *Countercyclical Buffer (CCB)* dalam rangka mencegah peningkatan risiko sistemik dari pertumbuhan kredit yang berlebihan serta menyerap kerugian yang dapat ditimbulkan. Kombinasi kebijakan makroprudensial tersebut secara umum dapat menahan perlambatan kredit dan mengendalikan risiko yang timbul pada sistem keuangan. Sinyal pelonggaran moneter juga tampak pada penurunan BI rate sejak 17 Desember 2015, dari 7,5 persen hingga saat ini di posisi

6,5 persen. Penurunan juga bertujuan mendorong pertumbuhan kredit baik dari sisi penawaran maupun permintaan sehingga diharapkan pertumbuhan sektor riil meningkat.

Pelonggaran moneter sejalan dengan program pemerintah dalam melaksanakan ekspansi sektor riil, terutama pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang semakin gencar harus didukung oleh sektor moneter yang lebih ramah kredit sehingga memudahkan pembiayaan pembangunan tersebut. Selain itu, suku bunga yang rendah untuk sektor riil juga akan menarik minat investor baik asing maupun dalam negeri untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur baik secara langsung maupun dalam bentuk Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hal ini akan sangat membantu pemerintah untuk mendapatkan alternatif dana bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sehingga dana APBN yang ada dapat dialokasikan ke program lain yang lebih menyentuh hajat hidup orang banyak atau yang dapat memenuhi kebutuhan dasar.

Namun, berdasarkan grafik 2, pada triwulan I tahun 2016 terjadi penurunan pertumbuhan kredit baru. Hal ini menunjukkan walaupun Bank Indonesia telah menurunkan BI rate, namun belum mampu mendongkrak pertumbuhan

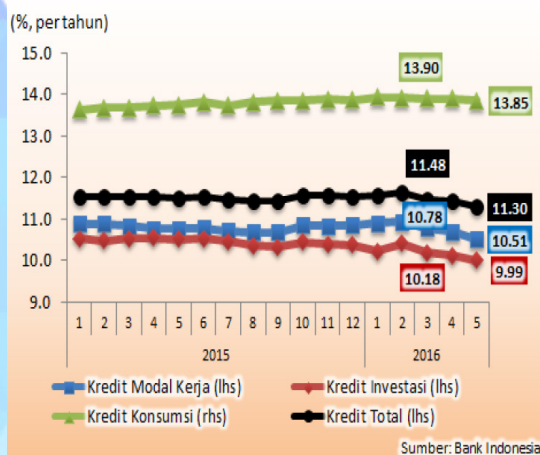
Gambar 2. Pertumbuhan Kredit Baru



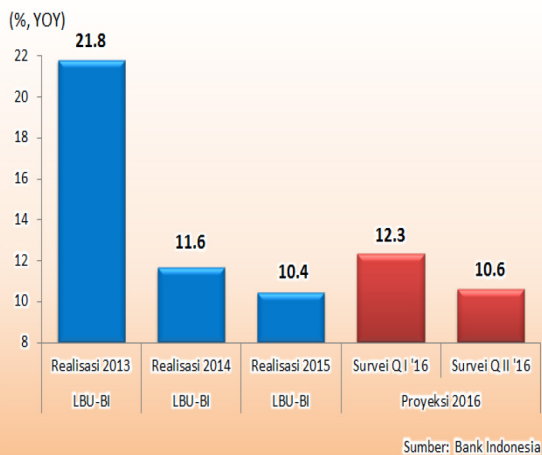
Sumber: Bank Indonesia

6) Bank Indonesia. www.bi.go.id

Gambar 3. Realisasi Suku Bunga Kredit (Rupiah)



Gambar 4. Pertumbuhan Kredit 2016



Sumber: Bank Indonesia
kredit baru. Pertumbuhan kredit baru mengalami perbaikan pada triwulan kedua yang tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru sebesar 78,8 persen. Meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan penurunan suku bunga kredit menjadi faktor utama

Sumber: Bank Indonesia
pendorong pertumbuhan kredit baru pada triwulan II tahun 2016.

Permintaan kredit baru pada triwulan II secara sektoral terjadi pada hampir semua sektor ekonomi. Permintaan kredit terbesar berada pada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (SBT 49 persen)

Tabel 1. Permintaan Kredit Baru Berdasarkan Jenis Kredit (SBT, %)

Jenis Kredit	Rincian Kredit	Periode			
		III-2015	IV-2015	I-2016	II-2016
Menurut Penggunaan	Kredit Modal Kerja	59.2	42.8	26.7	59.4
	Kredit Investasi	37.7	35.8	45.4	55.3
	Kredit Konsumsi	28.9	45.7	11.8	36.1
Kredit Konsumsi	KPR/KPA	9.0	36.6	14.8	46.3
	Kendaraan Bermotor	-11.9	-30.4	17.6	5.3
	Kartu Kredit	31.9	35.8	-31.9	22.7
	Multiguna	-11.8	10.2	-15.1	17.6
	Kredit Tanpa Agunan	20.2	21.0	2.9	10.2
Sektor Ekonomi*	Pertanian, Perburuan & Kehutanan	21.9	21.6	29.0	49.0
	Penanaman	20.8	44.6	15.0	21.8
	Pertambangan & Penggalian	-14.4	-43.0	-23.9	-17.2
	Industri Pengolahan	34.6	1.5	43.3	46.9
	Listrik, Gas & Air	15.9	46.3	48.5	40.7
	Konstruksi	27.9	51.6	41.1	40.8
	Perdagangan Besar & Eceran	24.6	38.7	46.2	32.9
	Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	10.1	-1.0	38.6	34.4
	Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	21.2	2.1	-1.7	27.5
	Perantara Keuangan	5.3	39.7	24.1	31.1
	Real Estate, usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan	1.0	-7.0	6.3	29.4
	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6.6	24.0	9.1	7.8
	Jasa Pendidikan	5.4	43.2	-7.2	40.5
	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	21.2	28.9	-5.4	0.2
	Jasa Kemasy. Sos. Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya	1.9	23.7	-3.4	-3.0
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	13.5	25.1	10.0	-2.1	
Badan Internasional & Badan Ekstra Internasional Lainnya	7.9	8.2	2.8	9.2	
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	18.6	-17.1	-8.8	14.6	
Golongan Debitur*	UMKM (KUR)	-6.1	7.5	8.9	25.1
	UMKM (Non KUR)	21.1	14.3	3.9	47.9
	Non UMKM	28.4	17.5	18.6	58.0
Orientasi Penggunaan*	Kredit Ekspor	-1.0	10.7	20.2	38.9
	Kredit Impor	-7.3	-1.1	1.9	4.3
	Kredit Lainnya	28.5	20.8	19.0	43.6
TOTAL PERMINTAAN KREDIT BARU		73.7	56.9	31.3	78.8

* Klasifikasi disesuaikan dengan format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), yakni 18 sektor ekonomi, golongan debitur dan orientasi penggunaan

Sumber: Bank Indonesia

dan sektor industri pengolahan (SBT 46,9 persen) . Sedangkan sektor yang berhubungan dengan infrastruktur mengalami penurunan.

Berdasarkan Grafik 2 dan 3 serta data pada tabel 1, pelonggaran moneter yang dilakukan Bank Indonesia ternyata belum mampu mengakselerasi sektor riil. Diharapkan dengan berlakunya instrumen BI 7-Day Repo Rate sebagai acuan yang baru, mampu meningkatkan permintaan kredit baru terutama di sektor-sektor yang mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, dana yang terakumulasi di pasar keuangan seharusnya dapat dialokasikan ke pembiayaan di sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Rekomendasi

7-day Reserve Repo Rate merupakan instrumen moneter yang digunakan BI untuk memudahkan merefleksikan kebijakannya di pasar keuangan. Instrumen baru ini mendekatkan jarak antara suku bunga pasar uang dengan suku bunga kebijakan. Selain itu, instrumen *7-day Reserve Repo Rate* juga ditujukan untuk memperdalam pasar keuangan di Indonesia. Dengan memperdalam kondisi pasar keuangan di Indonesia, aktivitas di pasar keuangan menjadi lebih sering. Kelebihan uang di BI dapat dialihgunakan sehingga pasar keuangan makin dalam karena mereka bergerak di waktu jangka pendek. Upaya ini juga diharapkan bisa menjadi model bagi perbankan. Karena untuk kepentingan interaksi keuangan antar bank, maka BI *7-Day Repo Rate* bisa digunakan sebagai acuan perbankan.

Dengan begitu, diharapkan kecenderungan bank meminjam atau menyimpan uang di BI menurun. Mereka akan lebih interaktif melalui transaksi *Repo* dan *Reverse Repo* sesuai acuan BI *7-Day Reverse Repo*.

Menurut BI, saat ini pembiayaan dari perbankan yang paling mendominasi kontribusi sektor keuangan ke pembangunan. Porsi perbankan mencapai 72 persen dari total pembiayaan di sektor keuangan ke pembangunan. ketika kontribusi perbankan sudah tinggi, maka diversifikasi pembiayaan dari sektor keuangan lain harus ditingkatkan. Sehingga perlunya diversifikasi pasar keuangan, agar tidak ada ketergantungan terhadap satu sektor. Selain itu, tetap harus diiringi kebijakan yang mampu menjaga pasar keuangan lebih efisien dan memiliki ketahanan terhadap gejolak. Pasar modal, dana pensiun, dan asuransi adalah tiga sektor yang memiliki potensi likuiditas untuk disalurkan menjadi pembiayaan pembangunan⁷.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. 2016. *Survey Perbankan Triwulan II-2016*
- Machmud Arief TM, All. *Quarterly Outlook On Monetary, Banking, And Payment System In Indonesia: Quater I. 2016*. Bank Indonesia. 2016
- Bank Indonesia. 2016. *Frequently Asked Questions (FAQs) Penguatan Kerangka Operasi Moneter*
- Bank Indonesia. 2016. *Lampiran Rapat Dewan Gubernur 19 Agustus 2016*
- Neraca.co.id. 11-04-2016.
- Koran.bisnis.com. 2-6-2016

7) Neraca.co.id



Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635/5715528, Fax. 021-5715528
e-mail puskaji.anggaran@dpr.go.id



9 772502 868006